

KONFLIK MINORITAS MELAYU DAN MILITER THAILAND
ANALISIS TERHADAP KRISIS POLITIK DI
SELATAN THAILAND

Oleh: DR. Yasril Yazid, MIS

Dosen Fakultas Dakwah UIN Suska Riau

Alamat: Jalan Garuda Sakti Perum Garuda Permai II Blok A.30, Panam, Pekanbaru

Abstrak,

Krisis politik di selatan Thailand hari ini bisa dikatakan sebagai manifestas konflik antara dua alam tersebut, yaitu konteks Kesultanan Pattani tradisional yang merupakan bagian dari alam Melayu (*Malay world*) dan status wilayah tersebut sebagai bagian dari kerajaan Thailand moderen yang berorinetasikan *Buddhist world-view*.¹ Dualisme antara tradisional (hakikat sejarah) dengan kontemporer sebagai realitas sekarang ini, merupakan salah satu faktor penyebab utama konflik yang berkepanjangan di wilayah-wilayah ini.

Key Word, Konflik, Minoritas Melayu, Militer Thailand, Krisis Politik, Selatan Thailand

A. Pendahuluan

Konflik bukanlah suatu yang muncul secara tiba-tiba. Ketika terjadi suatu konflik, sebenarnya ia sudah melalui suatu proses panjang dengan indikator-indikator yang bisa dirasakan.

Menurut pengamatan penulis, banyak pihak yang menganggap bahwa pada awalnya konflik ini hanya bersifat individu yang secara kebetulan berbeda agama. Karena tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh pihak pemerintah dan pemuka agama, di beberapa tempat konflik individu ini berkembang menjadi semakin luas dan sulit dikendalikan. Akhirnya perkara ini menimbulkan dendam yang sifatnya tidak lagi berbentuk individu tetapi sudah bersifat massa dan dendam yang bersifat keagamaan. Antara faktor utama yang mengandung potensi konflik tersebut antara adalah:

1. Pertentangan antara kelompok agama radikal. Bangsa Thailand yang memiliki berbagai agama dan aliran kepercayaan yang berbagai, seperti Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konfusianisme dan lain-lain. Kemajemukan agama ini semakin kompleks dengan wujudnya berbagai aliran dalam agama-agama tersebut mulai dari kelompok berfaham paling sederhana sampai kepada kelompok yang berfaham radikal, ekstrim dan fanatik. Kelompok yang terakhir inilah yang biasanya begitu sensitif dengan kelompok agama lain.
2. Hubungan mayoritas dan minoritas yang tidak harmonis. Agama Islam merupakan agama minoritas penduduk Thailand. Kondisi ini seringkali melahirkan hubungan yang tidak harmonis antar pemeluk agama mayoritas Budha dengan pemeluk agama minoritas. Potensi konflik terjadi apabila setiap kelompok mencurigai kegiatan penyebaran agama masing-masing (Hasan, 2001: 44-45).

Melihat pengalaman konflik di Thailand, maka untuk mengatasi konflik sosial keagamaan ini perlu diberikan perhatian yang lebih fokus kepada beberapa wilayah yang mempunyai kriteria seperti berikut:

1. Wilayah yang mempunyai struktur sosial seimbang baik dari aspek etnik maupun aspek agama. Sebagai contohnya, adalah konflik sosial keagamaan yang terjadi di wilayah Thailand Selatan yang jumlah penganut agama Islam sebanding dengan penganut agama Buddha. Perkara ini terjadi karena masing-masing pihak merasa mempunyai kekuatan dan pengaruh yang seimbang, sehingga tidak terdapat perasaan minoritas dan mayoritas dalam struktur masyarakat seperti ini.
2. Wilayah yang mempunyai struktur sosial yang tidak seimbang antara pendatang dengan penduduk lokal. Wilayah seperti ini merupakan wilayah potensi konflik paling berbahaya. Fenomena ini semakin kuat apabila penduduk lokal tersisih dan terkebelakang dari segi ekonomi maupun politik. Biasanya konflik akan selalu muncul di wilayah yang mempunyai ciri-ciri seperti ini.
3. Wilayah yang mempunyai struktur sosial industri, yang kaya dengan sumber alam, namun tidak dinikmati oleh penduduk lokal. (Noer, 2000: 13).

Oleh karena itu, tulisan yang serius tentang kondisi wilayah seperti ini perlu dilaksanakan oleh pemerintah, tokoh agama dan masyarakat Thailand untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Wilayah Selatan Thailand yang meliputi kawasan bekas Kesultanan Pataniⁱⁱ merupakan wilayah Thailand yang selalu dilanda krisis politik dan konflik bersenjata. Pada hakikatnya, konflik bersenjata dan krisis politik yang terjadi di Pattani, Yala, Narathiwat dan Songkhlaⁱⁱⁱ sejak belakangan ini sarat dengan *presedent* sejarah. Sehingga banyak pengamat sejarah dan politik beranggapan bahwa insiden kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan sorotan kembali sejarah 100 tahun silam.

Tulisan ini akan mengkaji dan menghuraikan krisis politik di selatan Thailand dengan latarbelakang konsep legitimasi sejarah. Tulisan ini juga ingin menyumbangkan suatu pemahaman tentang masyarakat Melayu di wilayah perbatasan selatan Thailand dari perspektif etno-historis. Pemahaman ini penting untuk menjelaskan kondisi terakhir di wilayah-wilayah tersebut. Perspektif sejarah juga telah menggariskan dengan tegas bahwa Pattani merupakan bagian dari dua dunia, yaitu dunia alam Melayu Islam (tradisional) dari satu aspek dan negara – bangsa Thailand (kontemporer) dari aspek yang lainnya. Krisis politik di selatan Thailand hari ini bisa dikatakan sebagai manifestas konflik antara dua alam tersebut, yaitu konteks Kesultanan Pattani tradisional yang merupakan bagian dari alam Melayu (*Malay world*) dan status wilayah tersebut sebagai bagian dari kerajaan Thailand moderen yang berorinetasikan *Buddhist world-view*.^{iv} Dualisme antara tradisional (hakikat sejarah) dengan kontemporer sebagai realitas sekarang ini, merupakan salah satu faktor penyebab utama konflik yang berkepanjangan di wilayah-wilayah ini.

Tulisan-tulisan sebelum ini telah menjelaskan bahwa sempadan nasional dan politik yang membagi negara Malaysia dengan Thailand ini kurang signifikan. Melihat adanya persamaan dari segi linguistik, agama, etnik dan persamaan budaya serta adanya hubungan persaudaraan antara kaum Melayu - Thai dengan Melayu di Malaysia, terlihat kecendrungan golongan Melayu-Thai dianggap lebih berorientasi ke Malaysia dibanding terhadap tanah kelahiran mereka Thailand. Karya-karya yang

kebanyakannya telah ditulis ketika gerakan-gerakan separatis di bagian Selatan Thailand memuncak, telah menegaskan bahawa isu etnik (termasukah isu keagamaan) dan ikatan persaudaraan melebihi sentimen-sentimen utama yang lainnya seperti ikatan negara. Ini menyebabkan kaum Melayu di Selatan Thai cenderung lebih merasa dan menganggap diri mereka sebagai masyarakat Melayu ketimbang sebagai rakyat Thailand. Faktor ini juga merupakan salah satu penyebab dan faktor pendorong konflik yang berkepanjangan di Selatan Thailand, yaitu adanya syak wasangka terhadap kesetiaan dan “ke-Thaian” masyarakat atau warga Melayu Islam Thailand terhadap negara mereka Thailand.

Persepsi-persepsi tersebut memerlukan penelitian lanjutan dengan lebih memfokuskan (*highlight*) perkembangan terbaru dalam konteks sosial politik yang terjadi di kedua negara bertetangga tersebut. Data-data sosial politik, sejarah dan fakta-fakta kontemporer dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman terperinci mengenai situasi terkini sekaligus sebagai satu solusi mengakhiri konflik bersenjata di wilayah-wilayah Selatan Thailand.

Situasi dan status quo golongan Melayu di Thailand semakin ketara ketika kumpulan separatis Melayu Patani mulai melakukan pemberontakan untuk kemerdekaan dan menuntut hak otonomi atas wilayah yang meliputi daerah-daerah bekas Kesultanan Melayu Patani. Kebangkitan kelompok separatis Melayu mencapai klimaksnya setelah Haji Sulong, seorang ulama yang dihormati dan tokoh yang gigih memperjuangkan hak-hak orang Melayu di Selatan Thailand ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kerajaan Thailand mulai kewalahan untuk menumpas gerakan ini setelah kelompok separatis Melayu semakin gencar melakukan serangan-serangan terhadap aset pemerintah. Menyikapi ini, kerajaan Thailand melibatkan tentara dan polisi untuk melancarkan serangan dan menangkap mereka yang terlibat dalam gerakan ini. Tindakan berlebihan dan pendekatan meliter yang digunakan oleh kerajaan ini membuat banyak masyarakat Melayu-Thai mencari suaka ke negara jirannya Malaysia.

B. Setting Politik Thailand Tahun 1930-1950

Pada tahun 1930-an terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan Thailand. Sistem *monthon* tidak terjadi lagi. *Monthon* Pattani dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Setiap *muang* (negeri) dijadikan *changwat* (provinsi) dan dipantau langsung oleh kerajaan pusat di Bangkok. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri, Pridi Panomyong memperkenalkan sistem baru dalam pemerintahannya. Setiap provinsi mempunyai seorang wakil di DPR, dan di wilayah selatan Thai ini wakil-wakil rakyat yang beragama Islam selalu terpilih dalam Majelis Perundangan Siam.^v

Setelah revolusi tahun 1932, pemerintahan kerajaan Thai telah menegaskan pembentukan negara Thai moderen di bawah suatu kesatuan (*unitary state*). Rakyat tidak lagi berada di bawah pemerintahan monarki mutlak, tetapi konsep rakyat sebagai warga (*citizenry*) negara - bangsa Thailand mulai diperkenalkan. Ini berarti masyarakat Melayu di Pattani menjadi bagian dari warga Thai dan mereka juga harus menonjolkan identitas baru negara Thai.

Pada tahun 1938, Phibun Songkhram, seorang Jenderal Militer Thai meng kudeta pimpinan kerajaan Thai. Antara kebijakan Phibun yang kontroversial adalah pelancaran kebijakan *rathniyom* (revolusi budaya) yang bertujuan menciptakan suatu identitas budaya Thai yang maju. Suatu kebijakan “mensiamkam” orang-orang bukan Thai (*siamization policy*) seperti orang-orang Melayu dan Cina. Kebijakan ini menjadikan masyarakat Melayu dan Cina dipaksa menukar nama asal mereka menjadi nama Thai dan berkomunikasi hanya dalam bahasa Thai. Hal yang sama juga pernah terjadi pada masa pemerintahan orde baru di Thailand.

Kebijakan pemerintah yang tetap melaksanakan undang-undang Pendidikan tahun 1921, yang mengharuskan sistem pembelajaran pendidikan di sekolah rendah dalam bahasa Thai, jelas semakin memperparah konflik antara kaum Melayu dengan kerajaan Thai. Masyarakat Melayu Islam di wilayah Selatan khawatir anak-anak Melayu akan melupakan bahasa ibu mereka, jika proses belajar mengajar menggunakan bahasa Thai. Lebih jauh lagi, ancaman kemungkinan akan terjadi konversi agama dalam komunitas Melayu yang beragama Islam ke agama Buddha akibat proses pendidikan di sekolah yang menggunakan bahasa Thai.^{vi}

Revolusi budaya Phibun Songkhram sepanjang 1938-1944 M, telah menindas kumpulan minoritas Cina dan Melayu. Di wilayah Selatan Thai, hanya masyarakat Thai - Buddha yang diangkat menjadi pegawai pemerintah, sedangkan kaum Melayu dan Cina yang menginginkan jabatan di pemerintahan harus mengganti nama mereka menjadi nama Thai.

Pada masa pemerintahannya, Phibun juga menghapus Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus keagamaan di daerah-daerah Melayu dan mengalihkan kasus-kasus yang berkaitan dengan keagamaan masyarakat Islam ke mahkamah-mahkamah sivil Thai.^{vii} Kebijakan ini mengakibatkan suatu implikasi yang serius dalam aspek harta warisan, upacara perkawinan dan undang-undang Syariah kaum Melayu.

Sementara itu, penaklukan Asia Tenggara oleh tentara Jepang yang dibantu oleh pemerintahan Phibun, mengakibatkan Thailand berkonfrontasi dengan Inggeris. Pemimpin-pemimpin masyarakat Melayu Pattani telah menggunakan kesempatan ini untuk mendapat simpati Inggeris, dengan menunjukkan kesetiaan dan membantu tentara Inggeris untuk mengalahkan tentara Jepang. Antara tokoh pejuang Melayu Pattani yang terlibat membantu Inggeris melawan Jepang antara lain adalah Tengku Mahmud Mahyiddeen yang merupakan putra Raja Terakhir kerajaan Pattani, Tengku Abdul Kadir. Beliau ikut menjadi Pasukan Tentara Sukarela Kelantan untuk menentang Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Inggeris Malaya, Mahyiddeen melarikan diri ke India bersama tentara Inggeris. Di India, beliau bekerja dengan Inggeris untuk mengerahkan sukarelawan Melayu agar menyertai *Angkatan 136* yang didirikan untuk bergerilia menentang penjajahan Jepang.^{viii} Ketika peperangan menentang Jepang hampir tuntas, Inggeris melihat pentingnya membentuk suatu sistem pengawasan internasional di perbatasan Siam-Malaya, mulai dari Segenting Kra (Kra Ithmus) sampai ke negeri-negeri Melayu Utara yang berada di bawah pemerintahan Thailand sewaktu Perang Dunia Kedua. Inggeris juga mulai mempertimbangkan kedudukan Pattani di bawah Inggeris Malaya secara serius untuk menghargai kesetiaan Pattani terhadap Inggeris dalam perang melawan Jepang.^{ix}

Mengantisipasi gerakan pro-kemerdekaan tersebut, pada Juli 1944, kerajaan Thai melalui gubernur Pattani, Janyawisat mengadakan pertemuan Majelis Pemilu Umum di Pattani untuk membahas keinginan Melayu Pattani yang ingin bergabung di bawah pemerintahan Inggris. Namun, hasil Deklarasi Persidangan Cairo 1945 yang memutuskan suatu resolusi tentang larangan penjajahan wilayah asing, maka keinginan untuk mengambil alih kawasan Selatan Thailand oleh Inggris menjadi sirna.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Malaya, telah memotivasi golongan Melayu di Pattani untuk mempertahankan negeri mereka dari pemerintahan Thai yang dianggap tidak adil. Pada bulan November 1945, masyarakat Melayu Pattani mengajukan petisi kepada Inggris untuk menyatakan rasa tidak puas hati atas tindakan kerajaan Thai yang tidak mengakui bahasa Melayu sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap identitas kaum Melayu. Petisi tersebut juga meminta Inggris untuk mengambil alih Pattani dari kerajaan Thai.^x

Namun petisi tersebut tidak mengubah *status quo* Pattani. Pihak Inggris tidak menuntut penyerahan wilayah dari Thailand kecuali pengembalian empat negeri Melayu di Utara Semenanjung Tanah Melayu. Pihak Inggris juga terpaksa akur dengan resolusi Persidangan San Fransisco yang diusulkan Amerika Serikat sebagai sekutu perang Inggris untuk mengahiri semua perang, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Ancaman campur tangan negara asing terhadap kasus Pattani telah mendesak kerajaan Thai untuk berwaspada dalam menerima suatu kesepakatan damai atas wilayah-wilayah Melayu di Selatan Thailand. Pelantikan *chularatchamontri* (Penasihat Urusan Agama Islam) pada tahun 1945 merupakan suatu langkah yang signifikan. *Chularatchamontri (Sheikhul-Islam)* ini berfungsi sebagai penasihat Raja Thai dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Satu badan majlis pusat dan majlis daerah untuk urusan Islam juga didirikan disetiap daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kebijakan ini merupakan bukti nyata bahwa Islam telah diberikan suatu legitimasi untuk pertama kalinya di Thailand.^{xi}

Usaha kerajaan Thai untuk mengintegrasikan Islam dan Melayu dalam rangka strukturisasi negara Thailand melalui kebijakan kerajaan adalah dengan memberikan status kewarganegaraan kepada kaum Melayu-Islam di Selatan Thai. Penggunaan istilah Thai-Islam untuk menggantikan istilah Melayu Islam bertujuan untuk menggolongkan mereka sebagai warganegara Thai. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan suatu bukti kongkrit bahwa kerajaan Thai berusaha untuk memutuskan hubungan antara masyarakat Islam Thai dengan identitas Melayu yang dikaitkan dengan negara tetangga Malaysia.

Berakhirnya masa pemerintahan Phibun telah membuat semua kebijakan pemerintah terhadap wilayah-wilayah Melayu ditinjau ulang oleh kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Khuang Aphaiwong yang liberal. Beliau mengirim Utusan Khusus ke wilayah-wilayah Selatan Thai untuk melaporkan penyebab munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Utusan Khusus tersebut berhasil membongkar segala tindakan diskriminatif dan penindasan yang dilakukan oleh beberapa pegawai kerajaan Thai-Siam yang bertugas di daerah-daerah Melayu.

Intelijen Thai juga melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (*Mahattai*) bahwa kerajaan Melayu menyokong gerakan pembebasan yang dilakukan oleh kaum Melayu Pattani. Kerajaan Malaya dilaporkan telah mengadakan sebuah persidangan Islam yang berlangsung di Bentong, Pahang pada tahun 1967, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Satun, Yala, Narathiwat dan Pattani. Antara mereka yang termasuk dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Inspektor Polisi di Baling, Kedah.^{xii} Keraguan Thailand terhadap dukungan Inggris terhadap pihak Melayu Pattani semakin nyata setelah mereka mengetahui Mahmud Mahyiddeen telah memimpin orang Melayu Pattani untuk menentang kerajaan Thai dari markas mereka di Kelantan.

Pada bulan April 1947, Haji Sulong seorang tokoh penting gerakan separatis Pattani mengajukan lima tuntutan kepada kerajaan Thai yaitu: ^{xiii}

1. Menuntut otonomi politik untuk semua wilayah Melayu Pattani

2. Mendesak kerajaan Thai mengangkat seorang Gubernur dari kalangan Melayu Pattani untuk menjalankan pemerintahan kolektif terhadap empat daerah di selatan yang mayoritas penduduknya adalah orang Melayu.
3. Meminta supaya bahasa Melayu diakui sama statusnya dengan bahasa Thai dan digunakan sebagai bahasa pengantar bagi sekolah dasar di wilayah-wilayah Selatan Thai.
4. Mendirikan Mahkamah Islam untuk menjalankan undang-undang Syari'ah.
5. Menggunakan hasil sumber alam daerah-daerah Melayu ini untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Permintaan Haji Sulong menuntut hak otonomi untuk memerintah daerah-daerah Melayu ini, menyebabkan pihak militer Thai menangkap Haji Sulong dengan tuduhan menghasut (*sedition*) pada Januari 1948.^{xiv}

Penangkapan Haji Sulong ini telah mendorong kemarahan di kalangan masyarakat Melayu. Tidak lama setelah penangkapan Haji Sulong, muncul artikel yang melaporkan tentang penindasan oleh Siam atas masyarakat Melayu di Selatan Thai yang ditulis oleh seorang wartawan Inggeris bernama Barbara Whittingham Jones dan diberitakan secara meluas diberbagai media massa.^{xv} Artikel tersebut telah mengakibatkan kemarahan kerajaan Siam dan Bangkok mulai mengambil tindakan agresif terhadap pemimpin-pemimpin Melayu sebagai usaha untuk membendung kegiatan kumpulan-kumpulan separatis di Selatan Thai. Orang Melayu yang dianggap terlibat dalam gerakan ini melarikan diri ke Malaya untuk menghindari penangkapan dan penindasan tentara Siam di wilayah-wilayah Selatan Thailand.

Era setelah Perang Dunia Kedua, penentangan serta aktivitas-aktivitas kumpulan separatis mulai semakin berkembang. Salah satu kumpulan tersebut adalah Gabungan Melayu Pattani Raya (GEMPAR), sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1948, dengan tujuan menyatukan kaum Melayu di Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun untuk menuntut kemerdekaan dari Siam.

C. Setting Politik di Thailand tahun 1950-1980an

Perkembangan situasi politik di Tanah Melayu pada era 1950-an sangat berbeda dengan era 1930-1940-an. Pada tahun 1930-1940-an, orang Melayu dan Inggris di tanah Melayu menunjukkan rasa simpati dan prihatin atas perjuangan kaum Melayu Pattani. Namun pada akhir tahun 1940-an memasuki awal tahun 1950-an, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan ancaman pihak komunis telah berhasil mengalihkan perhatian masyarakat Malaya untuk menitikberatkan persoalan internal mereka. Oleh sebab itulah dukungan masyarakat Tanah Melayu terhadap masalah Pattani mulai bekurang. Disamping itu, pihak Britis yang takut terhadap gerakan komunis, mulai bekerjasama dengan kerajaan Thailand untuk menumpas organisasi berhaluan kiri ini. Akibatnya, menjelang bulan November 1948, organisasi GEMPAR dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Inggris.^{xvi}

Jalinan kerjasama antara kerajaan Thailand dengan Inggris Malaya untuk menentang komunis telah mengubah kebijakan British Malay terhadap wilayah Melayu Pattani. Serangan-serangan komunis di daerah Kelantan dari perbatasan Thailand di Narathiwat, Yala dan Songkhla mulai mencemaskan kerajaan Inggris akan kemungkinan terjadi penyerangan komunis terhadap bagian utara Malaya.^{xvii} Akhirnya, pada tahun 1949, disepakatilah kerjasama untuk mewujudkan program keamanan bersama di perbatasan antara dua kerajaan itu.^{xviii} Efektifitas MoU ini membuat pemerintah Inggris di Malaya mulai mengancam segala aktivitas pro-Pattani di Kelantan.

Bekas anggota Partai Komunis Malaya (PKM) yang melarikan diri ke dalam hutan di bagian pedalaman Selatan Thailand mulai menghasut masyarakat disekitar perbatasan untuk melancarkan serangan ke Malaya. Hal ini telah menyebabkan wilayah-wilayah perbatasan Selatan Thailand kembali menjadi wilayah konflik. PKM dituduh mengerahkan kaum Melayu Islam di perbatasan menjadi geriliawan. Keadaan ini mengkhawatirkan kedua kerajaan dan mereka sadar bahwa mereka harus bekerjasama untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Pada tahun 1965, kegiatan separatis semakin memuncak dengan berdirinya Barisan Nasional Pembebasan Republik Pattani (*National Liberation Front of the Pattani Republic*,

(*NLF*) yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara Islam.^{xix} Sebuah Unit Militer Asing sebagai bagian dari NLF yang disebut dengan Tentara Nasional Pembebasan Rakyat Pattani (*Pattani People's National Liberation Army*) juga dideklarasikan. Di samping itu, masuknya pengaruh dan elemen eksternal sepanjang tahun 1970-an telah membawa implikasi besar terhadap skenario politik internal di wilayah Islam Thailand. Golongan Pemuda yang mendapat pendidikan dari universitas dan institutusi perguruan tinggi di Timur Tengah, Pakistan dan Malaya telah memperkenalkan ide-ide pembaharuan dunia Islam dan ini secara tidak langsung mempengaruhi gerakan perjuangan Pattani ketika itu.^{xx}

Periode ini merupakan masa ketegangan politik antara Malaya dengan Thailand. Malaysia menuduh Thailand memberikan perlindungan kepada bekas anggota PKM dan tidak menunjukkan komitmen untuk memberantas kegiatan geriliawan ini. Sebaliknya, Thailand menuduh dukungan yang diberikan oleh partai politik seperti Partai Islam Se-Malaysia (PAS) terhadap gerakan separatis di Thailand dan bantuan secara kontiniu yang diterima oleh kumpulan-kumpulan tersebut dari negara-negara Islam telah mengancam keamanan internal negara tersebut. Namun, Thailand mengakui bahwa masalah di perbatasan selatan itu hanya bisa diatasi melalui kerjasama dengan Malaysia. Perkembangan gerakan fundamentalis agama dan militansi Islam, terutama di negeri-negeri utara Tanah Melayu menghalang kerajaan Malaysia untuk campur tangan dalam isu provinsi-provinsi di Selatan Thailand, kerana takut akan dampak politik domestik yang serius. Mengingat kondisi ini merupakan suatu krisis politik yang sensitif, maka Kuala Lumpur tidak mau campur tangan dalam isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan Thai, dengan alasan hal itu merupakan masalah internal Thailand.^{xxi}

Menjelang tahun 1980-an, muncul tiga kumpulan separatis yang beroperasi di kawasan perbatasan di Selatan Thailand, yaitu gerakan separatis Islam, Komunis berbangsa Cina yang merupakan bekas anggota *Malayan Peoples Liberation Army* (MPLA) dan komunis Thai (*phu ko kan rai*). Dari ketiga kumpulan tersebut, kumpulan seperatis Islam adalah kelompok yang kurang mengancam keselamatan di bagian Selatan. Tindakan angkatan tentara Thai untuk membanteras golongan militan

berhasil menundukkan hampir semua anggota NLF menjelang tahun 1982. Kebanyakan pemimpin NLF melarikan diri dari Thailand dan mengungsi di negara asing.^{xxii} Pada tahun 1980-an, Bangkok telah mengambil keputusan untuk membujuk masyarakat Islam di Selatan Thailand dengan program-program pembangunan ekonomi sebagai usaha untuk mencegah kemungkinan bergabung dengan golongan separatis Melayu Islam dan MPLA.

D. Setting Politik tahun 1990-an

Perkembangan era 1990-an merupakan masa pengukuhan hubungan dan keamanan antara Bangkok dan wilayah-wilayah Selatan Thailand. Kebijakan-kebijakan kerajaan Demokrat Thai yang memegang tampuk pemerintahan mencoba pendekatan baru dengan program pengintegrasian (*inclusion*), setelah sekian lama mengadopsi sistem *exclusion*. Peranan orang Melayu dalam politik kebangsaan Thai dalam tahun 1990-an mulai membaik. Terbukti pada periode ini, banyak tokoh-tokoh Islam yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan Thai, seperti Surin Pitsuwan pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Thailand dan setelah itu menjadi Menteri Menteri Luar Negeri, Wan Muhammad Nor Mata menjadi Ketua Perhimpunan Kebangsaan Thailand dan Den Tohmeena, anak Haji Sulong pernah menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.^{xxiii} Usaha demokratisasi yang agresif sejak akhir tahun 1980-an hingga tahun 1990-an berhasil menciptakan kestabilan politik di Thailand. Peran orang Melayu yang semakin meningkat termasuk dalam proses perumusan perlembagaan terbaru Thai pada tahun 1997 membuktikan usaha-usaha kerajaan Thai untuk melibatkan orang Melayu dalam proses politik negara.

D. Perkembangan Politik Terakhir

Krisis ekonomi 1997, membuat Thailand dalam suasana ekonomi dan politik yang tidak stabil. Ini diikuti dengan insiden WTC, 11 September 2001 yang membawa dampak serius dalam krisis politik global dan keamanan serantau.

Masalah semakin panas ketika masyarakat dan kerajaan Thailand dikejutkan oleh isu keamanan negara ketika terjadi perampokan lebih 300 pucuk senjata di

komplek tentara Cho Ai Rong Narathiwat.^{xxiv} Insiden ini mengorbankan empat anggota Pasukan Keamanan Thailand. Kejadian ini menyebabkan wilayah Selatan dalam keadaan siaga satu dan hal ini juga mendapat perhatian khusus dari Bangkok, negara-negara tetangga dan dunia internasional. Keadaan semakin genting dengan terjadinya peristiwa penembakan di Mesjid Krisek (Krue Se)^{xxv} pada bulan April 2004 yang mengorbankan 107 orang. Seterusnya, pada 25 Oktober 2004, peristiwa Tak Bai^{xxvi} yang menelan korban lebih 100 orang Melayu-Thai dari wilayah Selatan.

Ketiga peristiwa ini membuktikan bahwa kajadian tersebut memaparkan pola-pola persamaan dengan sejarah politik Pattani pada awal abad ke-20. Insiden-insiden tersebut juga mencerminkan manifestasi perasaan ketidakpuasan rakyat Selatan Thailand terhadap pemerintahan Bangkok. Tindakan Bangkok menggunakan kekerasan untuk mengamankan keadaan membawa implikasi negatif sehingga wilayah-wilayah tersebut terus menjadi medan konflik.

Setelah Januari 2004, kembali terjadi serangan terhadap orang sivil yang beragama Islam, Buddha dan anggota Pasukan Keamanan (PK) Thailand yang telah menjadikan krisis di wilayah Selatan sebagai krisis nasional. Untuk menangani insiden dan keganasan ini, Bangkok memberlakukan undang-undang tentara (*Martial Law*). Kebijakan ini mendapat sorotan dari dalam dan luar negara, kerana undang-undang tentara memberikan kekuasaan yang mutlak kepada tentara.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pasukan Keamanan Thailand adalah memeriksa rumah penduduk, mesjid dan pondok pesantren, kerana tempat-tempat ini mereka anggap sebagai tempat tinggal atau tempat persembunyian anggota yang terlibat dengan kumpulan separatis. Banyak pemuda dan ulama Melayu ditangkap setelah undang-undang tentara diterapkan.

Di samping itu, jumlah korban rakyat sivil dan anggota Pasukan Keamanan terus meningkat ketika undang-undang tentara dijalankan. Sepanjang Januari sampai April 2004 saja, 94 orang terbunuh dan 95 orang lagi cedera. Agensi internasional

seperti OIC juga telah mempersoalkan transparansi tindakan kerajaan Thailand dalam menangani masalah konflik bersenjata di wilayah Selatan Thailand.^{xxvii}

Narathiwat merupakan tempat yang paling sering terjadi kontak bersenjata, yaitu sebanyak 297 kali, wilayah Pattani dan Yala, masing-masing dengan 188 dan 76 insiden serangan. Songkhla yang terdiri dari mayoritas orang Thai yang beragama Buddha (90 %) dibandingkan wilayah-wilayah Narathiwat, Pattani dan Yala.

Sedangkan insiden kematian dan cedera tertinggi terjadi di wilayah Narathiwat dan Pattani yang masing-masing mempunyai persentase penduduk Islam yang tinggi, yaitu 83 % (Narathiwat) dan 84 % (Patani) dibandingkan wilayah Yala dan Songkhla dengan persentase penduduk 57 % (Yala) dan 10 % (Songkhla).

Keadaan yang semakin kacau ini, dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak puas terhadap pemerintah. Serangan ini mungkin dilakukan oleh penduduk setempat yang marah terhadap tindakan pihak berkuasa terutama oragnisasi kriminal atau pengedar ganja selain anggota gerakan separatis. Ia mungkin strategi untuk menakutkan pasukan keamanan Thailand yang beroperasi di wilayah Selatan.

Walaupun pada dasarnya, serangan terhadap PK dan warga sivil kelihatan secara *random*, namun serangan terhadap orang sivil yang berada di lokasi terpencil, supaya tidak disaksikan oleh orang lain juga menunjukkan satu *trend* yang menunjukkan bahawa serangan tersebut adalah serangan yang sudah direncanakan. Berdasarkan kasus keganasan yang terjadi di wilayah-wilayah selatan Thailand antara tahun 2001 dan 2004. Pada tahun 2004 menunjukkan jumlah kasus keganasan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah kasus meningkat hampir tujuh kali lipat dari tahun 2000 sampai 2003. Kedua strategi serangan dilakukan secara *random* dan terencana ini menyebabkan jumlah kasus keganasan di wilayah-wilayah selatan Thailand meningkat secara mendadak pada tahun 2004.

Selain separatis Islam, sebenarnya banyak pihak yang terlibat dalam kasus keganasan di Selatan Thailand. Karena itu keganasan di Selatan Thailand sering

disebut oleh sejarawan Thai sebagai sebagai “keganasan *khao yam*”(Keganasan Nasi Kerabu). *Khao yam*, adalah sejenis makanan di wilayah Selatan Thai yang biasanya dihidangkan pada waktu pagi yang dibuat dari berbagai macam ramuan. Seperti *khao yam* yang mengandung berbagai bahan makanan, kemelut politik di Selatan Thai juga mempunyai dilakoni oleh banyak aktor.

Antaranya, kumpulan gedebe (*nak kleng*) yang merupakan anggota kumpulan yang terlibat dalam pembunuhan dan berbagai kegiatan penyelundupan, penjualan senjata dan ganja. Mereka juga menjadi pembunuh bayaran untuk *chao pho* (orang besar) yang merupakan ketua kelompok kriminal yang beroperasi seperti kumpulan *mafia* . Beberapa orang tokoh politik Thailand diduga menjadi *chao pho* dan terlibat dalam merusak kestabilan politik dan keamanan negara demi menjaga kepentingan perniagaan mereka.

Pasukan keamanan Thailand yang terdiri dari Militer Thailand (*Royal Thai Army*) dan Polisi Thailand (*Royal Thai Police*), juga dituduh terlibat dalam konflik ini. Namun, diantara semua aktor yang dinyatakan di atas, kumpulan gerakan separatistlah sering dituduh bertanggung jawab atas keganasan di Selatan Thailand. Kalau dicermati secara kritis, pada hakikatnya kebanyakan dari kumpulan pejuang separatist yang giat beroperasi pada tahun-tahun 1960-1980-an tidak lagi aktif. Sebagian pecah menjadi beberapa buah kumpulan kecil, dan perpecahan ini menjadikan organisasi-organisasi tersebut semakin lemah dan tidak efektif dalam memperjuangkan tujuan organisasi mereka. Antara kumpulan-kumpulan separatist tersebut adalah Barisan Revolusi Nasional (BRN), Gerakan Mujahideen Islam Pattani (GMIP), *Pattani United Liberation Organisation* (PULO) dan New PULO serta barisan kemerdekaan Pattani (*Pattani United Front for the Independence of Pattani*).

Kerusahan “Orang Kecil”

Sejarawan Thai, Nidhi Aeusrivongse dalam analisis beliau mengenai keganasan di Selatan Thailand menyatakan bahawa keganasan di Selatan Thailand sepanjang 2004 merupakan *kabot chao na*, yaitu perjuangan orang kecil. Tindakan membakar, membunuh pegawai pemerintah dan mencuri senjata menurutnya

bukanlah kejadian *isolated*, tetapi melibatkan satu gerakan yang bisa memobilisasi orang banyak, terutamanya masyarakat di daerah. Beliau juga mempersoalkan penglibatan kumpulan separatis atau pihak militan. Ini berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin gerakan seperti PULO dan BERSATU yang menyokong dan memuji pejuang “orang kecil” yang terlibat dalam serangan bulan Januari dan bulan April 2004, tetapi mereka menolak bahawa gerakan mereka bertanggungjawab dalam serangan-serangan tersebut. Yang pasti adalah kumpulan seperti PULO dan BERSATU menumpang kejayaan “orang kecil” dan menyokong aksi mereka. Lantaran memberikan suatu gambaran perhubungan atau kaitan dengan pejuang-pejuang”orang kecil” tersebut, namun pada hakikatnya PULO dan BERSATU bukanlah penggerak utama serangan bulan Januari dan bulan April 2004. PULO dan BERSATU sekarang ini semakin lemah dalam mengatur organisasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu serangan. Kedua-dua organisasi tersebut tidak pernah melakukan serangan secara besar-besaran dan berterusan seperti yang terjadi sepanjang tahun 2004 hingga sekarang.

Dengan kata lain, PULO dan BERSATU merupakan “*freeriders*” dalam kejayaan “orang kecil” dalam insiden menentang kerajaan Thai. Dalam satu pertemuan pada bulan Mei 2005, tokoh kharismatik organisasi BERSATU, Wan Kadir Che Man ketika ditanya tentang jalan penyelesaian krisis di Selatan ini menyatakan, “....*there will be more incidents in in the future unless the goverment is willing to dialogue with us...*”

Walau bagaimanapun, Wan Kadir tidak dapat memberikan penjelasan lanjut mengenai siapakah yang terlibat dalam keganasan di Selatan Thailand dan tidak menyatakan dengan tegas bahawa BERSATU terlibat. Setelah bulan Mei 2005, berbagai usaha dilaporkan di surat kabar Thailand tentang dialog antara kerajaan dan kumpulan separatis, tetapi semua usaha itu tidak berhasil. Bangkok sebaliknya mengambil langkah tegas seperti mengumumkan undang-undang tentera dan yang terbaru Undang-undang Darurat yang memberikan kuasa “*extra-judicial*” kepada militer.

Kesimpulan

Realitas sebuah negara Pattani merdeka adalah suatu “ide” yang tidak dapat direalisasikan, kerana usaha-usaha untuk mendapatkannya tidak pernah dilakukan secara profesional. Tindakan pembakaran, pemboman dan pembunuhan secara “*hit and run*” jelas tidak menunjukkan usaha yang terencana dan matang untuk mewujudkan ide tersebut. Sehingga rumusan dan ide sebuah negara merdeka ini adalah suatu aspirasi yang bersifat utopia semata. Sebaliknya, objektif utama pihak gerakan separatis adalah mendapatkan kekuasaan dan melibatkan diri dalam menentukan pembangunan sosio-ekonomi dan politik di wilayah-wilayah Selatan.

Gerakan separatis Selatan Thailand gagal menggunakan legitimasi sejarah Pattani yang berubah dari “*Malay Heartland*” menjadi bagian wilayah dalam negara Thai Buddha. Bagi orang-orang Pattani, wilayah Selatan Thailand yang merangkumi bekas kerajan Pattani adalah tanah yang diperjuangkan, sedangkan bagi kerajaan Thai, wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah-wilayah yang telah ditawan dan dikuasai. Legitimasi sejarah yang tidak diterjemahkan dalam konteks legitimasi politik ini merupakan satu faktor kelemahan dan kegagalan gerakan separatis Selatan Thai jika dibandingkan dengan gerakan separatis lain di rantau ini seperti perjuangan Bangsamoro di Selatan Philipina, gerakan Aceh Merdeka dan Timor Leste.

Melihat insiden sepanjang tahun 2004 sampai pertengahan 2005, terlihat sasaran serangan pada umumnya berisiko rendah seperti telefon umum, rumah pribadi, *night club* dan sekolah dengan menggunakan taktik *low-intensity* seperti membakar, memancung serta menggunakan *homemade-bombs* yang melibatkan kumpulan kecil dan perorangan. Semua aspek ini menunjukkan serangan di wilayah Selatan itu sesuatu yang bersifat “*localised*” dibandingkan dengan pola serangan gerakan militan global seperti Jemaah Islamiah (JI) atau al-Qaeda yang menjadikan lokasi umum dan tempat rekreasi para turis mancanegara seperti hotel, kawasan peranginan dan sistem pengangkutan umum seperti rangkaian kereta api bawah tanah, pesawat terbang dan lain sebagainya. Insiden dan krisis politik di selatan Thailand ketika ini hanya pada tahap lokal. Kebijakan-kebijakan kerajaan yang efektif serta kerjasama di antara kerajaan dan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencari jalan penyelesaian

secara ikhlas pastinya dapat membantu krisis ini ditangani sebelum ia berkembang menjadi lebih besar dan bersifat global.

Sampai hari ini konflik masih tetap berlanjut di wilayah Selatan Thai (Naratiwat, Yala, Pattani dan Songkhla), meskipun pemerintahan Thaksin Sinawatra telah digulingkan oleh tentara pimpinan Jenderal Sonthi, yang beragama Islam dan mendapat restu Raja Thai.

Pengakuan Bangkok terhadap sejarah masyarakat Pattani sebagai satu kesinambungan dari sejarah bekas Kesultanan Pattani (abad ke-14 hingga 19) dan desakannya untuk mengintegrasikan Pattani dengan sejarah negara bangsa Thailand yang kontemporer (abad ke 20 hingga 21) mungkin merupakan langkah paling berkesan dalam menangani masalah di selatan Thailand.

ⁱ Mengenai sejarah Patani dan aspek sosio budaya masyarakat Patani lihat Mala Rajo Sathian (2004), "Economic Change in the Pattani region c. 1880-1930: Tin and Cattle in the Era of Siam's Administrative Reforms", Tesis Ph.D National University of Singapore.; Nik Anuar Nik Mahmud (1999), *Sejarah Perjuangan Melayu Patani: 1785-1954*. Bangi: Penerbit UKM.

ⁱⁱ Patani adalah ejaan bahasa Melayu yang merujuk kepada wilayah bekas Kesultanan Patani sedangkan Pattani adalah ejaan Bahasa Thai yang merujuk kepada *changwat* (provinsi) Pattani sebagai salah satu dari empat provinsi Islam di bagian selatan Thailand sekarang ini. Ejaan Patani merujuk kepada wilayah bekas Kesultanan Patani (sehingga 1901), sedangkan Pattani merujuk kepada wilayah Pattani setelah reformasi pemerintahan pada tahun 1901 ditandai dengan Proklamasi Diraja 1901 (1901 *Royal Decree*).

ⁱⁱⁱ Keempat wilayah ini merupakan wilayah mempunyai penduduk Islam yang tinggi yaitu Narathiwat 83 persen dan Patani 84 persen, Yala 57 persen sedangkan Songkhla hanya 10 persen.

^{iv} Mengenai sejarah Patani dan aspek sosio budaya masyarakat Patani lihat Mala Rajo Sathian (2004), "Economic Change in the Pattani region c. 1880-1930: Tin and Cattle in the Era of Siam's Administrative Reforms", Tesis Ph.D National University of Singapore.; Nik Anuar Nik Mahmud (1999), *Sejarah Perjuangan Melayu Patani: 1785-1954*. Bangi: Penerbit UKM.

^v Mengenai pembaharuan sistem pentadbiran di Patani lihat, Margaret L.Koch, "Patani and Development of a Thai State", *Journal the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society (JMBRAS)*, Vol.50, Pt.2, 1997, h. 69-88. Lihat juga, Nantawan Haemindra, "The Problem of the Thai Muslim in the four Southern Provinces of Thailand", Part 1 and 2, *Journal of Southeast Asian Studies (JSEAS)*, 7/2, (1976), hlm, 197-225 dan 8/1 (1997), h. 85-105.

^{vi} Untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang perkembangan pendidikan di wilayah selatan Thailand lihat, Uthai Dulyakasem (1981), *Education and Ethnic Nationalism: A study of the Muslim Malay in Southern Siam*, Disertasi Ph.D, Stanford University, 1981.

^{vii} Conner Bailey dan John N. Miksic (terj.) "The Country of Patani in the Period of Reawakening" – A Chapter from Ibrahim Syukri's *Sejarah Kerajaan Melayu Patani* dlm D.W.Forbes (ed). *The Muslims of Thailand*, Vol.2, Bihar: Centre for Southeast Asian Studies, 1989, h. 157.

^{viii} Clive J. Christie, *A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism*. London: Tauris Academic Studies and Singapore: ISEAS, 1996, h. 178. Informasi tentang perjuangan Mahmud Mahyideen lihat, Mohd. Zamber A. Malek (1999), *Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyideen*, Bangi: Penerbit University Kebangsaan Malaysia.

^{ix} CO 537/4744

^x FO 371/54421/F 2433, Suprema Allied Commander, Southeast Asia to J.C. SterndaleBennett (Far Eastern Dept FO London), 31 Jan 1946. Mengandung petisi oleh delapan orang pejuang Melayu Patani.

^{xi} Clive J. Christie (1996), *op.cit.*, h. 182. Perspektif kontemporer tentang *Chularatchamontri* lihat, Imtiyaz Yusof, "Islam and Democracy in Thailand: Reforming the Office of the Chularajmontri (Syaiikh al-Islam)", *Journal of Islamic Studies* 9 (2), h. 277-298.

^{xii} Arsip Negara Thailand (NA), r.7, (2) SR. 0201.38/6, Report from Yala to Ministry of Interior, Fail yang berjudul, "*Improving the Administration of Patani, Yala, Narathiwat and Satun 1945-1948*", 9 Sept 1947, h. 38.

^{xiii} Clive J. Christie, *Op.cit.*, h. 183.

^{xiv} Setahun kemudian (1948), Haji Sulong dan tiga lagi rakan seperjuangan dijatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun atas tuduhan memfitnah kerajaan (libel) menerusi surat-surat edaran yang disebar di kalangan masyarakat Islam di selatan Thailand. Lihat *Bangkok Post*, 1 Mac 1949.

^{xv} Barbara W. Jones, "Patani Appeals to UNO" dalam *Eastern World*, Vol.11, No.4. April 1948. Lihat juga *Straits Times*. 30 Oktober 1947.

^{xvi} Mohd. Zamberi A. Malek. *Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyiddeen*, h. 141

^{xvii} *New Straits Times*, 23 Agustus, 1948

^{xviii} CO 717/156/4/F 15736. S.G. Thompson (British Legation Bangkok) kepada R.H.Scott Esq. (Southeast Asia Departement, Foreign Office). 10 Oktober 1949

^{xix} Gerakan NLF diketuai oleh oleh cucu bekas Raja Pattani yaitu Tengku Abdul Kadir, lihat Andrew D.W. Forbes. "Thailand's Muslims Minorities: Assimilation, Secession or Coexistence", dalam Andrew D.W.Forbes (ed), *The Muslims of Thailand*, h. 186

^{xx} Lihat, Astri Suhrke (1975), "Irredentism Contained; The Thai-Muslim Case" *Comparative Politics* 7(2), h. 199.

^{xxi} Hans H. Indorf, *Impediments to Regionalism In Southeast Asia: Bilateral Constraints Among ASEAN Member States*, Singapore: ISEAS, 1984, h. 38-42

^{xxii} Hans H. Indorf. *Impediments to Regionalism*, h. 40

^{xxiii} Omar Farouk Bajunid, "Islam, Nationalism and The Thai State", dlam. Wattana Sugunnasil (ed). *Dynamic Diversity in Southern Thailand*, Chiang Mai; Silkworm Books, 2005, h. 13

^{xxiv} Laporan Inteligen -6119 dalam Operasi Coi Ai Rong 2004.

^{xxv} Ini merupakan Insiden terbesar dan paling banyak menelan korban jiwa umat Islam, keterangan yang lebih lengkap tentang ini lihat Supara Janchitfah (2004), *Violence in the Mist: Reporting on the Presence of Pain in Southern Thailand*, Bangkok: Kobfai Publishing, h. 239-240.

^{xxvi} Nazarudin Yahya (2004), *Kemelut Politik Wilayah Selatan Thailand 2004: Suatu Analisa*, h. 42.

^{xxvii} The Star, "OIC May Question Thailand", 29 Juni 2005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : DR. Yasril Yazid, MIS
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Bangkinang/ 29 April 1972
3. Nomor Induk Pegawai (N I P) : 150 368 225
4. Pangkat Golongan Ruang : III/ c (Lektor)
5. Pekerjaan : Dosen UIN Suska Riau

-
6. Jabatan : Ketua Jurusan Pers dan Grafika FDIK
7. Pendidikan : SD 004 Pulau 1985
: Pondok Pesantren Darun Nahdha Thawalib
Bangkinang (MTSN Kuok) 1989
: Pondok Pesantren Darun Nahdha Thawalib
Bangkinang (MAN Kuok) 1992
: S1 IAIN Imam Bonjol Padang 1995
: S2 Universiti Kebangsaan Malaysia 1999
: S3 Universiti Malaya 2005
8. A l a m a t : Jalan Garuda Sakti Perum Garuda Permai II
Blok A.30, Panam^{xxvii}